

ॐ ए १ १/१ ॥

TULISAN-TULISAN
JAMES ROBERT PUALILIN
Dalam Media Online



TULISAN-TULISAN
JAMES ROBERT PUALILLIN

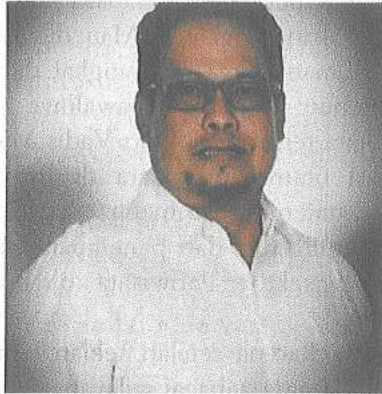
Dalam Media Online



DAFTAR ISI

Mamasa Dalam Berita	1
Refleksi 15 Tahun Mamasa	8
Keberadaan lembaga adat Di mamasa.....	17
Catatan Kecil Tentang Keberadaan Lembaga Adat di Mamasa	23
Calon Pemimpin Mamasa Saatnya Bicara Visi-Misi, Bukan Saling Hujat.....	28
Dosen IPDN Apresiasi Semangat Pengelola Kebun Percontohan Sahabat Petani	30
Mengelolah Objek Wisata Buntu Liarra' Tidak Harus Menunggu Pemda	33
Akademisi : Objek Wisata Buntu Liarra, Lebih Baik Di Kelola BUMDES	36
Politik Baliho Sebagai Komunikasi Politik Pragmatis	38

Mamasa Dalam Berita



MdB: Perspektif

Sebuah Pandangan Pembangunan Pariwisata Sulawesi Barat

MAMASA, MdB

QUO VADIS MAMASA SEBAGAI DAERAH DESTINASI UTAMA PARIWISATA DI PROVINSI SULAWESI BARAT ?

Oleh : James R. Pualillin

Jakarta, 17 Maret 2017

Pasti kita sudah sering mendengar istilah Quo Vadis kan ? Quo Vadis Liga Indonesia ? Quo Vadis Pilkada Indonesia ?

Quo Vadis Otonomi Daerah ? Quo Vadis Demokrasi di Indonesia ? Nah, apa sih sebenarnya arti Quo Vadis itu sendiri? Quo Vadis berasal dari Bahasa Latin yang artinya: “Kemana kamu akan pergi?”, “Mau dibawa kemana?”, “Mau ke arah kemana kita?”. Berangkat dari pemahaman arti kata tersebut, saya mengawalinya juga dengan menggunakan kata tersebut : “Quo Vadis Mamasa, sebagai daerah destinasi utama Pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat ?” Tentu, statement itu mengandung makna sebuah sukacita dan bentuk kritis dari penetapan Mamasa sebagai Destinasi Utama sektor Pariwisata di Sulawesi Barat.

Perasaan sukacita, karena setelah sekian lama keberadaan Mamasa (sejak Mamasa sebagai wilayah Hadat Pitu Uluna Salu, bagian dari Afdelling Mandar, yaitu Onther Afdelling Mamasa, Kecamatan Mamasa dari Kabupaten Polmas, dan saat ini menjadi Kabupaten Mamasa) baru ada sebuah pengakuan dari pemerintah di atasnya (dalam hal ini Provinsi Sulbar), bahwa Mamasa memiliki “potensi Pariwisata”, sehingga melalui PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 – 2034, tanggal 7 Februari 2014, pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf b, dan dikuatkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang “PENETAPAN KABUPATEN MAMASA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN” di Provinsi Sulawesi Barat, memberi justifikasi hukum akan potensi Pariwisata Mamasa. Hal ini diperkuat oleh PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 – 2035, tanggal 10 Juni 2015.

Pertanyaan selanjutnya, setelah pengakuan dan legal formal akan potensi pariwisata di Kabupaten Mamasa adalah mau di bawah kemana ? atau mau kemana Pariwisata Mamasa ke depan ? atau mau dibawa kemana rencana tersebut ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa di jawab, jika semua stakeholder di Mamasa terlibat secara aktif – kontributif (Dalam hal ini Pemda Mamasa, Masyarakat Mamasa, dan pelaku bisnis pariwisata di Mamasa), baik di luar dan di dalam Mamasa.

Peran Stakeholder

Pemerintah Daerah (Provinsi Sulbar – Kabupaten Mamasa).

Peran pemerintah (Provinsi dan Kabupaten) menjadi peran yang paling penting dalam mengimplementasikan rencana Mamasa sebagai Destinasi Utama/Unggulan Pariwisata di Provinsi Sulbar, selain karena Pemda memiliki authority (kewenangan yang di milikinya, sebagai urusan pilihan mengacu UU Pemda No 23 Tahun 2014), juga karena Pemerintah memiliki resources dan capacity dalam pencapaian target tersebut.

Sehingga peran pemerintah (eksekutif-legislatif), baik Provinsi maupun Kabupaten, perlu didorong untuk menindak lanjuti dengan segera menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA, skala Provinsi dan Kabupaten). Ruang lingkungnya mencakup pemetaan potensi pariwisata per-wilayah, strategi-strategi pengembangan infra struktur pariwisata dengan cakupan

dari hulu ke hilir, penataan dan penguatan kapasitas SDM di sektor pariwisata, menumbuh kembangkan service culture (budaya melayani) dari para pelaku pariwisata dan masyarakat pariwisata yang akan mendorong kondisi kondusif bagi pengembangan pariwisata.

Penyusunan dan penetapan RIPPDA (Provinsi dan Kab. Mamasa) itu tentu harus bersifat holistic, integrative dan linkage antara pelaksanaan urusan Pariwisata dengan semua urusan sektor lainnya (seperti pendidikan, pertanian, perikanan, perkebunan, infrastruktur dll); sehingga tercapai sinergitas pelaksanaan semua urusan pemerintahan dalam rangka akselerasi pencapaian “Mamasa sebagai Destinasi Utama / Unggulan Pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat”.

Selain itu, RIPPDA yang di buat oleh Provinsi Sulawesi Barat harusnya juga memiliki instrument yang memberi ruang mekanisme kerja sama antar Pemerintah Daerah, sehingga target “Mamasa sebagai Destinasi Utama Pariwisata di Prov. Sulbar”, mendapat support dan dukungan dari semua Pemerintah Daerah yang ada di Sulawesi Barat (Kab. Mamuju Utara, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju Majene, Kab. Polman), sehingga perlu peran pro aktif dari Pemda Kab. Mamasa untuk membangun kerjasama antar pemda tersebut. Contoh, dengan adanya pelabuhan laut di Mamuju yang melayani transportasi laut antara Kalimantan Timur (Balikpapan) – Mamuju, dapat di tangkap sebagai peluang bagi pintu masuk wisatawan ke Kab. Mamasa.

Baik Provinsi Sulbar maupun Kabupaten Mamasa, juga dapat membangun kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja serta Toraja Utara,

sehingga melalui kesepakatan kerjasama bisa terbangun daerah segitiga emas destinasi wisata antara Makale – Rantepao – Toraja.

Salah satu strategi di dalam RIPDDa Provinsi tersebut juga akselerasi perbaikan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, baik dari Mamuju – Mamasa, Polewali – Mamasa dan Toraja – Mamasa. Dengan kemudahan aksesibilitas transportasi darat akan memberi banyak kesempatan bagi akselerasi pengembangan pariwisata di Mamasa.

Yang paling penting juga, Provinsi dan Pemda Kab. Mamasa adalah menyusun, melaksanakan program-program community development berbasis participant, sehingga masyarakat Mamasa bisa terlibat secara aktif, sebagai bagian (subyek pariwisata), bukan menjadi obyek dan penonton dari program pengembangan pariwisata Mamasa. Untuk itu perlu menyusun program yang terintegrasi antar semua sektor (urusan) pemerintahan, dalam rangka capacity building masyarakat.

Masyarakat Mamasa dan Pelaku Bisnis Pariwisata (di dalam dan di luar Mamasa)

Persoalan masyarakat pariwisata dan pelaku bisnis di Mamasa, (Hipotesis sementara saya saat ini dari hasil observasi dan studi literatur yang saya lakukan), selain kendala soal faktor finance (biaya pengembangan usaha pariwisata), juga faktor keterbatasan pendidikan (menyangkut skill atau keterampilan dan service culture atau budaya melayani), keterbatasan akses pasar (market), promosi dan teknologi (Saya berpikir Pemda Kab. Mamasa perlu melakukan kajian yang representative, holistic dan

terintegratif untuk lebih dapat memecahkan permasalahan yang saya petakan di atas secara valid dan terukur dengan menggunakan methodology kajian/riset yang tepat, sehingga dapat membuat rencana aksi sebagai problem solving dari permasalahan yang saya petakan secara hipotesis).

Pemetaan persoalan yang saya kemukakan di atas t, dapat menjadi pijakan awal bagi Pemerintah (Provinsi dan PemKab. Mamasa), untuk konsen dan focus dalam menyusun, membuat dan melaksanakan program2 penguatan kapasitas (capacity building), dan program2 community development berbasis participant. Sehingga infra struktur sektor pariwisata khususnya masyarakat dan pelaku bisnis di sektor pariwisata, dapat kita persiapkan dari awal. Yang paling penting keterlibatan Masyarakat Mamasa di luar Mamasa juga perlu di pertimbangkan untuk dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan terkait program2 capacity building dan community development tadi, dengan kontribusi pemikiran, aksebilitas jaringan, informasi, finance dan teknologi.

Catatan Kecil saya (my note) :

1. Majene bukan sebagai destinasi Wisata Sulbar seperti dalam Perda RTRW Prov. Sulbar, tapi sebagai kawasan Pendidikan. Mamasa yang menjadi destinasi unggulan sektor pariwisata di Prov. Sulbar. Sehingga bagi saya ini adalah tantangan dan peluang untuk menerima kenyataan ini. (bisa menjadi berita buruk bisa juga menjadi berita gembira, tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri dan menghadapinya).

2. Saya berpikir, ketika seorang wisatawan ke Mamasa yang mereka tanyakan apa obyek wisata di Mamasa, di mana kami menginap (nyaman, bersih, aman), di mana kami makan, dan apa transportasi untuk akses ke lokasi, serta apa yang bisa kami nikmati di sana. (Something to see, Something to do, and Something to buy)
3. Saya membayangkan, ketika saya (wisatawan) ke Mamasa dan berkunjung ke rumah Hadat/Adat (Tongkonan), selain saya bisa berfoto ria (selvie dengan view back ground rumah adat dan pemandangan di sana), saya juga bisa duduk2 di sana untuk menikmati dan menyaksikan beberapa warga yang melakukan kerajinan tangan (ukir dan tenun), hitung2 ada produk2 yg kecil dan harga terjangkau, lalu saya bisa menikmati kuliner sederhana di lokasi itu (deppatori dengan sajian kopi Mamasa yang harum dan hangat), lalu saat saya menikmati kuliner tadi ada sajian pentas tarian/music bambu dari warga sekitar lokasi. Mungkin saya di lokasi itu tidak hanya 5 menit u/foto-foto tapi bisa berjam-jam bahkan tidak pulang karena di sediakan home stay dengan "tema alam dan suasana adat"

Salama, JRP

<https://m.facebook.com/MamasaDalamBerita/posts/1131981073578242:0>

REFLEKSI 15 TAHUN MAMASA

Penulis [Transtipo](#) - Maret 26, 2017 564



Catatan ringan tentang dunia pendidikan di Kabupaten Mamasa, sebuah refleksi dan bahan kontemplasi pada peringatan 15 tahun terbentuknya Kabupaten Mamasa.

Oleh: JAMES R. PUALILLIN

SEJAK lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (ketika itu), merupakan titik awal bagi kedua daerah tersebut sebagai suatu daerah otonom yang mendapat *rekonigsi* (pengakuan) dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom.

Sejalan dengan bergulirnya perubahan regulasi pemerintahan daerah khususnya kebijakan otonomi daerah, mulai dari UU 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU 32/2004 dan terakhir UU 23/2014, menuntut setiap daerah otonom untuk mampu (mandiri) menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Termasuk Pemerintah Kabupaten

Mamasa, diharapkan mampu menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan (wajib maupun pilihan).

Sebelum mengulas lebih jauh soal bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tidak ada salahnya kita mencoba membangun konstruksi pemikiran kita dengan bertanya pada diri sendiri (secara filosofi).

“Mengapa perlu ada pemerintah?” Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan mencoba melihat antara lain, beberapa pandangan (teori) tentang sejarah terbentuknya pemerintah itu sendiri.

Menurut J. J. Rousseau (seorang filosof modern yang pemikirannya dianggap mampu menginspirasi terjadinya revolusi Perancis 1789-1799) yang mengatakan, terbentuknya negara/pemerintah disebabkan oleh adanya keinginan masyarakat untuk membuat “kontrak sosial” kepada beberapa orang (sebagai perwakilan pemimpin dari masyarakat atau seorang pemimpin) yang dianggap/dinilai mampu melindungi dan memberi rasa aman dan ketertiban bagi masyarakat banyak.

Dalam teori “Kontrak Sosial” (*Du Contract Social*) ini, sumber kewenangan berasal dari masyarakat (rakyat) itu sendiri. Teori kontrak sosial ini juga dikemukakan oleh beberapa filosof lainnya, seperti Thomas Hobbes dan Jhon Locke dengan berbagai perbedaan pendekatan.

Namun, saya tidak ingin menggiring pemikiran dan pemahaman kita tentang perbedaan pemikiran di antara para filosof tersebut. Yang ingin saya kemukakan adalah

menjawab pertanyaan yang saya ajukan di atas tadi, “mengapa perlu ada pemerintah?”

Dari pandangan J. J. Rousseau tadi, bisa kita rumuskan bahwa pemerintah diperlukan tidak lain adalah untuk menciptakan *law and order* (ketentraman dan ketertiban), dan juga untuk menciptakan *welfare* (kesejahteraan) bagi masyarakat umum.

Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut maka pemerintahan menjalankan beberapa fungsinya antara lain: memberikan pelayanan kepada publik; melaksanakan pembangunan (fisik dan non fisik); mendorong pemberdayaan masyarakat; dan membuat peraturan (*rule of game*). Fungsi-fungsi pemerintahan itu di jalankan dengan pendekatan politik dan administrasi.

Pendekatan politik, bahwa fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah tadi merupakan produk-produk politik dalam bentuk kebijakan publik yang dirumuskan melalui proses dinamika politik di antara para aktor politik (infra dan suprastruktur).

Proses politik dalam mempengaruhi lahirnya berbagai kebijakan publik tersebut, merupakan hasil proses identifikasi (*input*) masalah publik/masyarakat (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll) melalui media (jaring asmara/musrenbang/ruang reses anggota DPR/D), sebagai aktualisasi fungsi agregasi dan artikulasi atas berbagai persoalan publik tadi yang dirumuskan menjadi produk-produk kebijakan publik.

Pendekatan administrasi, ketika proses politik telah selesai (*done*) dan menjadi produk-produk kebijakan publik, maka secara administrasi kebijakan-kebijakan publik tersebut dijalankan (dilaksanakan) oleh eksekutif beserta jajaran birokrasinya dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); penggerakan (*actuating*); penganggaran (*budgeting*); dan pengawasan internal (*internal control*) dengan memerhatikan (*resources*) sumberdaya yang ada (SDM, *time*, informasi dan teknologi).

Pendekatan administrasi tidak berhenti pada penerapan prinsip-prinsip manajemen seperti di atas, tapi bagaimana kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) kepada publik, sebagai pemilik sumber kewenangan tadi (dalam teori “Kontrak Sosial” tadi) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, komunikatif dan partisipatif.

Kembali pada pernyataan tulisan saya di atas (pada paragraf awal), terkait urusan pemerintahan. Ada hal yang menarik bagi saya ketika menonton/membaca media (tv, media tulis) yang memberikan informasi tentang gambaran persoalan terkait di dunia pendidikan di Kabupaten Mamasa.

Saya mencoba mencantumkan link beritanya, agar kita dapat melihat pemberitaannya <https://m.vidio.com/watch/571830-vido-miris-begini-sekolah-kandang-ternak-di-mamasā> dan <https://m.vidio.com/watch/483175-kilas-indonesia-siswa-mamasā-susuri-bibir-jurang-demi-sekolah>.

Setelah menyaksikan pemberitaan melalui link media yang saya sajikan, kita semua pasti tahu bahwa urusan pendidikan di Republik ini adalah salah satu urusan pemerintahan yang diwajibkan terkait dengan pelayanan dasar (merujuk UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Bab IV pasal 12), selain urusan wajib lainnya terkait dengan pelayanan dasar, seperti kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, trantib-linmas dan sosial.

Bahkan untuk penentuan keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sektor pendidikan menjadi salah satu indikator yang sangat berpengaruh. Sehingga ketika pemerintah mengabaikan sektor pendidikan dan sektor-sektor lainnya yang menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, tentu situasi tersebut sangat mengusik kita semua.

Namun dalam menerima informasi pemberitaan tersebut juga tidak serta merta kita harus percaya begitu saja tanpa melihat secara komprehensif persoalan yang terjadi di lapangan dengan didukung oleh data-data yang ada.

Melalui tulisan catatan kecil ini, saya mencoba merespon persoalan pemberitaan tersebut secara proporsional dan mencoba melihat dengan dukungan data (hasil studi literatur secara sederhana yang saya lakukan).

Jika kita membaca data BPS Sulbar tahun 2015, menunjukkan kenaikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mamasa dari periode tahun 2010 – 2015 (dari 60,88 menjadi 63,17) mengalami peningkatan, dengan laju perkembangan 0.50 (2015).

Data IPM selama kurun waktu enam tahun terakhir, capaian pembangunan manusia di Kabupaten Mamasa terus membaik dengan status pembangunan manusia “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Namun, untuk mendapatkan angka IPM tersebut dipengaruhi oleh dimensi-dimensi yang menjadi indikator penilaiannya, antara lain dimensi kesehatan (angka harapan hidup), dimensi pendidikan (angka harapan lama sekolah, angka lama sekolah), dan dimensi hidup layak (pengeluaran perkapita).

Jika kita sekedar mengacu pada capaian angka-angka IPM dari hasil perhitungan-perhitungan statis saja, maka kita akan kehilangan substansi dalam melaksanakan urusan pendidikan, sehingga permasalahan yang muncul seperti yang ramai diberitakan di media akan terlewatkan (terabaikan).

Apalagi ukuran dari dimensi pendidikan dalam perolehan hasil angka IPM hanya mengukur angka harapan lama sekolah dan angka lama sekolah. Belum bicara soal perbandingan antara rasio murid dan guru, sarana dan prasarana pendidikan, kualitas guru, dan lain-lain.

Harus diakui bahwa enam tahun terakhir banyak perbaikan dan kemajuan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Mamasa dalam melaksanakan urusan pendidikan, namun demikian perlu ada beberapa saran pemikiran saya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pendidikan yaitu:

Pemkab perlu melakukan analisis lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten, tingkat kemiskinan, lapangan kerja, harapan masyarakat terhadap pendidikan, pengalaman-pengalaman praktek

yang baik, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perubahan lingkungan strategis harus diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten di Mamasa agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis;

Pemkab diharapkan dapat melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini (dalam kenyataan) yang meliputi profil pendidikan di Kabupaten Mamasa (pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi), pemetaan sekolah, guru dan murid, kapasitas manajemen dan sumberdaya, serta *best practices* model-model kebijakan pendidikan saat ini di beberapa daerah lainnya, sebagai bahan perbandingan;

Pemkab dapat memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang sesuai kebutuhan karakteristik wilayah Kabupaten Mamasa yang dituangkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan, dengan cakupan pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan kapasitas pendidikan di Kabupaten Mamasa;

Mencari kesenjangan antara butir (2) dan butir (3) sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana pendidikan keseluruhan di masa yang akan datang (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Kesenjangan/tantangan yang dimaksud mencakup pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan pengembangan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten dan sekolah;

Berdasarkan hasil butir (4) disusunlah rencana kegiatan tahunan untuk selama 5 tahun (rencana strategis) dan rencana kegiatan rinci tahunan (rencana operasional);

Melaksanakan rencana pengembangan pendidikan Kabupaten Mamasa melalui upaya nyata yang dapat meningkatkan pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten dan sekolah;

Pemkab dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan. Hasil evaluasi akan memberitahu apakah hasil pendidikan sesuai dengan yang direncanakan. Pada hakekatnya sebuah perencanaan dibuat dalam rangka untuk mengubah "situasi pendidikan saat ini" (dalam kenyataan) menuju ke "situasi pendidikan yang diharapkan" di masa mendatang.

Untuk itu, ada tiga kata kunci yang harus dipahami, yaitu kebijakan, perencanaan dan program pendidikan (harus saling terpadu, integrative, holistic dan partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pendidikan di Kabupaten Mamasa).

Catatan akhir saya, dinas pendidikan dan para *stakeholders* pendidikan lainnya, perlu membuat pemikiran inovatif-kreatif mengenai model pembangunan sistem pendidikan yang terintegrasi, yang diramu dengan mengakomodasi upaya peningkatan dan pencapaian berbagai kebijakan pendidikan (pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, dan lain-lain yang ditargetkan) **secara bersama-sama, bukan**

secara parsial dan berurutan, termasuk aspek *sustainability* (keberlanjutannya).

Sekadar sebagai contoh, hasil peningkatan dan pencapaian pemerataan dan perluasan akses pendidikan, perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan (proses pendidikan dan guru-guru, misalnya), tapi juga perlu memperhatikan aspek relevansi (misalnya, target Kabupaten Mamasa ke depan, sebagai pusat atau Destinasi utama Pariwisata di Sulbar).

Aspek keberlanjutannya perlu juga dipikirkan, jangan sampai berjalannya sebuah kebijakan hanya tergantung pada ada tidaknya subsidi dana dari pemerintah pusat, sementara ketika subsidi dana pusat ditiadakan/dicabut, lalu kebijakan di sektor pendidikan tersebut tidak dapat berjalan.

Ditulis saat dinas luar di Kota Ternate, 24 Maret 2017

<http://www.transtipo.com/opini/refleksi-15-tahun-mamasa/>

KEBERADAAN LEMBAGA ADAT DI MAMASA

April 13, 2017 mediarestorasi 0 Komentar featured



MAMASA, mediarestorasi.com – Mencermati pemberitaan di Media on line di Mamasa Community melalui berita dari “Mamasa Dalam Berita”, terkait penyerahan beberapa rancangan Peraturan Daerah dan salah satunya adalah Rancangan Perda tentang “Lembaga Adat”. Menurut saya, keberadaan lembaga adat di Mamasa sangat penting, mengingat karakteristik kehidupan masyarakat Mamasa yang masih kental dilandasi oleh adat istiadat dan budaya nenek moyang. Namun yang menjadi pertanyaan saya, apakah Lembaga Adat yang sekarang ada, merupakan lembaga yang secara representasi telah mewakili dari keterwakilan *stakeholders* Hadat di ex-wilayah Hadat Pittu Ulunna Salu (PUS) ? Jika jawabannya belum, maka menurut pemikiran saya, Draft Perda tersebut terkesan

sangat terburu-buru, dan terkesan dipaksakan untuk mendapat legitimasi melalui dewan (DPRD), karena dalam proses pembentukan dan pengisian personilnya belum melalui pembahasan yang melibatkan semua *stakeholders* sebagai keterwakilan dari para pemangku Hadat di ex-wilayah Hadat PUS.

Jika, jawabannya bahwa keberadaan dan pengisian personilnya sudah mewakili elemen-elemen pemangku Hadat dari ex-wilayah Hadat PUS, maka pertanyaan saya selanjutnya, kapan pembentukannya ? Dan Apakah peran Lembaga Adat tersebut ke depan dalam kehidupan Hadat yang masih di pegang dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat Mamasa?

Pertanyaan-pertanyaan saya tersebut, tidak ada maksud sama sekali dari saya untuk menghalangi atau merintangangi niat baik Pemda Mamasa dalam upaya memfasilitasi tumbuh kembangnya lembaga adat di Mamasa, tapi lebih pada pertanyaan-pertanyaan untuk memberi support dan dukungan, agar niat baik tersebut ke depan dapat memperkuat eksistensi keberadaan lembaga adat, dalam melaksanakan peran dan fungsinya, serta bagaimana kedudukannya di tengah kehidupan masyarakat Hadat di Mamasa.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya, tidak ada salahnya kita mencoba mendudukan persoalan ini secara komprehensive, dengan memetakan dalam beberapa agenda kegiatan, yang mungkin sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mamasa atau kalau pun belum dilakukan, mungkin saja pemikiran saya ini dapat menjadi saran tindak bagi Pemerintah Daerah Mamasa terkait

dengan penyempurnaan Draft Peraturan Daerah Tentang Lembaga Adat yang sudah berada di tangan DPRD Mamasa saat ini, yaitu :

Pertama :

Sudah sepatutnya, rancangan draft Perda tentang Lembaga Adat tersebut merupakan hasil musyawarah dan percakapan secara intens dan serius antara Pemda (eksekutif, legislatif) dengan komponen perwakilan masyarakat Hadat di setiap ex-wilayah Hadat PUS, termasuk dengan perwakilan gereja/mesjid, sehingga draft Perda yang sekarang telah di serahkan oleh pihak eksekutif ke pihak legislatif (DPRD), secara konteks, filosofi dan sejarah telah dipahami dengan baik oleh semua *stakeholders* Hadat di setiap ex-wilayah Hadat PUS, karena telah melalui mekanisme keterlibatan dalam pembahasan, musyawarah dan diskusi secara intens.

Pemahaman saya yang termuat dalam draft Perda tentang Lembaga Adat tersebut, antara lain :

- Kedudukan, kewenangan, peran dan fungsi Lembaga Adat di dalam kehidupan Hadat Masyarakat Mamasa saat ini, tentunya dengan mempertimbangkan aspek **SEJARAH** dari keberadaan dan eksistensi dari 7 (tujuh) ex-wilayah Ke-Hadatan PUS, sebelumnya.
- Bagaimana hubungan fungsional antara lembaga adat dengan Pemerintah Mamasa, dalam kehidupan Hadat Masyarakat Mamasa. Kenapa bukan hubungan struktural, karena Lembaga Adat tidak berada di bawah (secara struktur) dari Pemda

Mamasa, sehingga hubungannya adalah **HUBUNGAN FUNGSIONAL**.

- Pengisian personil lembaga adat, tentu berdasarkan pada pertimbangan sejarah dan pengakuan dari semua komponen Hadat di ex-wilayah Hadat PUS, sehingga **ASPEK KETERWAKILAN** dan **PENGAKUAN**, menjadi pertimbangan penting dalam pengisian keterwakilan pemangku Lembaga Adat ke depan.
- Pengaturan tentang sumber-sumber "resources" yang akan mendukung kegiatan-kegiatan Lembaga Adat ke depan, sehingga keberadaan Lembaga Adat benar-benar hadir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk menumbuh kembangnya kehidupan Hadat dalam tatanan kehidupan masyarakat di Mamasa. Bukan sebagai alat politik praktis dari kepentingan-kepentingan sesaat.

Kedua

Sebagai Lembaga Adat, ke depan peran dan fungsinya harus diberi penguatan terkait dalam membina dan menjaga hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat Hadat di Kabupaten Mamasa, seperti :

- Dalam kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat, peran dan fungsi Lembaga Adat lebih di dahulukan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan/persoalan hadat yang terjadi di tengah masyarakat
- Setiap perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, sebaiknya Lembaga Adat diberi ruang keterlibatan untuk memberikan masukan pada para pengambil

kebijakan dengan perspektif-perspektif yang mempertimbangkan kearifan lokal/hadat.

- Diminta atau tidak diminta Lembaga Adat dapat memberi masukan pada pemerintah daerah, aparat keamanan, pejabat gereja/pengurus mesjid, terkait menumbuh kembangkan tata kehidupan hadat di masyarakat, sehingga para pemangku kepentingan di atas dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong tumbuh kembangnya tata nilai budaya/adat yang harmonis di tengah-tengah kehidupan masyarakat Hadat di Mamasa.

Ketiga

Lembaga Adat, menjadi mitra kerja bagi aparat Pemda, aparat keamanan dan tokoh gereja/mesjid, untuk menjaga keharmonisan tata kehidupan masyarakat di Mamasa yang masih memegang teguh nilai-nilai Hadat dan budaya nenek moyang.

Catatan kecil :

Keberadaan Lembaga Adat yang ada saat ini, menurut pemikiran saya mungkin bisa menjadi cikal bakal atau pionir bagi lahirnya Lembaga Adat yang benar-benar merupakan representasi perwakilan komponen-komponen Hadat di ex-wilayah Ke-Hadatan PUS, dan dapat juga menjadi narasumber yang memberi masukan bagi Pemda untuk penyempurnaan Draft Perda Tentang Lembaga Adat, khususnya terkait dengan, antara lain :

- Kedudukan, kewenangan, peran dan fungsi Lembaga Adat (Pertimbangan Sejarah)
- Bagaimana hubungan fungsional antara lembaga adat dengan Pemerintah Mamasa, dalam kehidupan Hadat Masyarakat Mamasa (Hubungan Fungsional)
- Pengisian personil lembaga adat, tentu berdasarkan pada pertimbangan sejarah dan pengakuan dari semua komponen Hadat di ex-wilayah Hadat PUS (Aspek Keterwakilan dan Pengakuan)
- Sumber-sumber "*resources*" untuk penguatan keberadaan lembaga Adat dalam kehidupan masyarakat Mamasa.

Jakarta, 13 April 2017

<http://www.mediaestorasi.com/lapsus/tokoh/keberadaan-lembaga-adat-di-mamasa/>

Jika, jawabannya bahwa keberadaan dan pengisian personilnya sudah mewakili elemen-elemen pemangku Hadat dari ex-wilayah Hadat PUS, maka pertanyaan saya selanjutnya, kapan pembentukannya ? Dan Apakah peran Lembaga Adat tersebut ke depan dalam kehidupan Hadat yang masih dipegang dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat Mamasa?

Pertanyaan-pertanyaan saya tersebut, tidak ada maksud sama sekali dari saya untuk menghalangi atau merintangai niat baik Pemda Mamasa dalam upaya memfisolitasi tumbuh kembangnya lembaga adat di Mamasa, tapi lebih pada pertanyaan-pertanyaan untuk memberi *support* dan dukungan, agar niat baik tersebut ke depan dapat memperkuat eksistensi keberadaan lembaga adat, dalam melaksanakan peran dan fungsinya, serta bagaimana kedudukannya di tengah kehidupan masyarakat Hadat di Mamasa.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya, tidak ada salahnya kita mencoba mendudukan persoalan ini secara komprehensif, dengan memetakan dalam beberapa agenda kegiatan, yang mungkin sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mamasa atau kalau pun belum dilakukan, mungkin saja pemikiran saya ini dapat menjadi saran tindak bagi Pemerintah Daerah Mamasa terkait dengan penyempurnaan Draft Peraturan Daerah Tentang Lembaga Adat yang sudah berada di tangan DPRD Mamasa saat ini, yaitu:

Pertama, sudah sepatutnya, rancangan draft Perda tentang Lembaga Adat tersebut merupakan hasil musyawarah dan percakapan secara intens dan serius antara Pemda

(eksekutif, legislatif) dengan komponen perwakilan masyarakat Hadat di setiap ex-wilayah Hadat PUS, termasuk dengan perwakilan gereja/mesjid, sehingga draft Perda yang sekarang telah di serahkan oleh pihak eksekutif ke pihak legislatif (DPRD); secara konteks, filosofi dan sejarah telah dipahami dengan baik oleh semua *stakeholders* Hadat di setiap ex-wilayah Hadat PUS, karena telah melalui mekanisme keterlibatan dalam pembahasan, musyawarah dan diskusi secara intens.

Pemahaman saya yang termuat dalam draft Perda tentang Lembaga Adat tersebut, antara lain;; Kedudukan, kewenangan, peran dan fungsi Lembaga Adat di dalam kehidupan Hadat Masyarakat Mamasa saat ini, tentunya dengan mempertimbangkan aspek **sejarah** dari keberadaan dan eksistensi dari 7 (tujuh) ex-wilayah Ke-Hadatan PUS, sebelumnya;

Bagaimana hubungan fungsional antara lembaga adat dengan Pemerintah Mamasa, dalam kehidupan Hadat Masyarakat Mamasa. Kenapa bukan hubungan struktural, karena Lembaga Adat tidak berada di bawah (secara struktur) dari Pemda Mamasa, sehingga hubungannya adalah **hubungan fungsional**;

Pengisian personil lembaga adat, tentu berdasarkan pada pertimbangan sejarah dan pengakuan dari semua komponen Hadat di ex-wilayah Hadat PUS, sehingga aspek **keterwakilan** dan **pengakuan**, menjadi pertimbangan penting dalam pengisian keterwakilan pemangku Lembaga Adat ke depan;

Pengaturan tentang sumber-sumber "resources" yang akan mendukung kegiatan-kegiatan Lembaga Adat ke depan, sehingga keberadaan Lembaga Adat benar-benar hadir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk menumbuh kembangnya kehidupan Hadat dalam tatanan kehidupan masyarakat di Mamasa. Bukan sebagai alat politik praktis dari kepentingan-kepentingan sesaat.

Kedua, sebagai Lembaga Adat, ke depan peran dan fungsinya harus diberi penguatan terkait dalam membina dan menjaga hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat Hadat di Kabupaten Mamasa, seperti: Dalam kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat, peran dan fungsi Lembaga Adat lebih di dahulukan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan/persoalan hadat yang terjadi di tengah masyarakat;

Setiap perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, sebaiknya Lembaga Adat diberi ruang keterlibatan untuk memberikan masukan pada para pengambil kebijakan dengan perspektif-perspektif yang mempertimbangkan kearifan lokal/hadat;

Diminta atau tidak diminta Lembaga Adat dapat memberi masukan pada pemerintah daerah, aparat keamanan, pejabat gereja/pengurus mesjid, terkait menumbuh kembangkan tata kehidupan hadat di masyarakat, sehingga para pemangku kepentingan di atas dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong tumbuh kembangnya tata nilai budaya/adat yang harmonis di tengah-tengah kehidupan masyarakat Hadat di Mamasa.

Ketiga, Lembaga Adat, menjadi mitra kerja bagi aparat Pemda, aparat keamanan dan tokoh gereja/mesjid, untuk menjaga keharmonisan tata kehidupan masyarakat di Mamasa yang masih memegang teguh nilai-nilai Hadat dan budaya nenek moyang.

Catatan kecil:

Keberadaan Lembaga Adat yang ada saat ini, menurut pemikiran saya mungkin bisa menjadi cikal bakal atau pionir bagi lahirnya Lembaga Adat yang benar-benar merupakan representasi perwakilan komponen-komponen Hadat di ex-wilayah Ke-Hadatan PUS, dan dapat juga menjadi narasumber yang memberi masukan bagi Pemda untuk penyempurnaan Draft Perda Tentang Lembaga Adat, khususnya terkait dengan, antara lain:

Kedudukan, kewenangan, peran dan fungsi Lembaga Adat (Pertimbangan Sejarah); Bagaimana hubungan fungsional antara lembaga adat dengan Pemerintah Mamasa, dalam kehidupan Hadat Masyarakat Mamasa (Hubungan Fungsional); Pengisian personil lembaga adat, tentu berdasarkan pada pertimbangan sejarah dan pengakuan dari semua komponen Hadat di ex-wilayah Hadat PUS (Aspek Keterwakilan dan Pengakuan);

Sumber-sumber "*resources*" untuk penguatan keberadaan lembaga Adat dalam kehidupan masyarakat Mamasa.

Jakarta, 13 April 2017

<http://www.transtipo.com/news/catatan-kecil-tentang-keberadaan-lembaga-adat-di-mamasa/>

Calon Pemimpin Mamasa Saatnya Bicara Visi-Misi, Bukan Saling Hujat

Penulis Transtipo - September 13, 2017



TRANSTIPO.com, Mamasa – James Robert Pualillin – salah seorang dosen di Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) menuturkan keprihatinannya terhadap kondisi calon pemimpin Mamasa – saat ini – untuk lima tahun mendatang.

Ia mengungkapkan, calon pemimpin itu seharusnya sudah menyampaikan visi dan misinya untuk periode lima tahun ke depan, ketika ia dipercaya rakyat Mamasa jadi pemimpinnya. Sehingga masyarakat tidak terjebak saling menghujat.

Menurut James, sampai saat ini, kita belum mendengar tentang program kerja riil yang ditawarkan—dan tentunya apa yang akan dikerjakan—dari sejumlah bakal calon yang akan maju di pemilihan bupati (Pilbub) 2018 mendatang jika ia dipercaya masyarakat Mamasa jadi pemimpinnya.

Dengan begitu maka masyarakat mengetahui apa tujuan para bakal calon untuk jadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.

“Baru sekedar slogan- slogan kamouflage yang belum jelas mau dibawa ke mana Mamasa lima tahun ke depan. Sementara, mengurus pemerintahan itu bukan sekedar membalikkan telapak tangan, atau cukup berkata *sim*

salabim. Tidak begitu,” kata James Robert kepada laman ini via telepon, Senin malam, 11 September 2017.

James mengungkapkan, calon pemimpin harus tahu apa kekuatan, kelemahan, tantangan, dan hambatan kita di daerah. Setelah hal tersebut sudah dipetakan, seorang pemimpin harus tahu memulai dari mana?

Sementara, kebutuhan publik banyak. Dan, yang harus diperhatikan adalah kebijakan yang memiliki dampak multiflier efek bagi sektor lain yang akan ikut bergerak.

“Makanya selalu saya utarakan, urus pemerintahan itu, bukanlah urus politik semata—terus-terusan. Proses kebijakan memang proses politik, tapi begitu proses politik (baca: Pilkada) selesai, maka yang bersangkutan harus tahu mau ke mana *management* pemerintahan akan dikelola,” ungkapnya.

Namun, kata James Robert, tidak sedikit figur—dalam pemerintahan misalnya—kadang tidak paham apa orientasinya ketika ia memerintah. Sehingga, meski anggaran besar tapi hasil tidak dirasakan manfaatnya oleh publik. Dan, yang lebih fatal lagi jika anggaran sudah kecil, yang kelola juga tidak paham hanya mampu bermain politik praktis.

Akibatnya birokrasi dipolitisir, anggaran dipolitisir. Semua yang terkait manajemen pemerintahan dipolitisir—mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

FRENDI CHRISTIAN

<http://www.transtipo.com/daerah/mamasa/james-calon-pemimpin-mamasa-saatnya-bicara-visi-misi-bukan-saling-hujat/>

Dosen IPDN Apresiasi Semangat Pengelola Kebun Percontohan Sahabat Petani

September 20, 2017



MAMASA, MdB—Sebagai tindak lanjut MOU antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa tentang Kegiatan Pengabdian Masyarakat Perdesaan Di Kabupaten Mamasa yang sudah ditandatangani beberapa waktu, Kamis 14 September 2017 4 Dosen IPDN kembali sambangi Kabupaten Mamasa.

Mereka adalah Drs. James R. Pualillin, M.Si., kampus Jakarta, Paryoto, SE., MM., kampus Jatinangor, Irfan Uluputti, S.STP., M.Si., kampus Jatinangor dan Dr. Ir. Andi Tenriola Rivai, M.Si., kampus Sulsel serta dua asisten

pendamping yakni, Dr. Haikal Ali dan M. Helmi Zein, S.IP.

Setelah diterima oleh Kadis Pempdes Kabupaten Mamasa, Yahya, MH., bertempat di kantor Kec. Mamasa, dipandu langsung oleh Camat Mamasa, Abd. Rahman Jalin, secara bergantian keempat dosen tersebut memberi materi kepada perangkat desa Lambanan dan desa Tondok Bakarui yakni materi tentang Pemerintahan Desa terkait Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat terkait pemberdayaan Bumdes, Bidang Perencanaan Pembangunan Desa terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Desa serta materi tentang Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kegiatan ini dimaksud untuk mendorong bagi pengembangan kapasitas dan kualitas masyarakat serta Pemda untuk mewujudkan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan mendorong kemandirian daerah. kegiatan ini juga didasari pada standar mutu penjaminan pendidikan atau quality assurance, penelitian, advokasi, publikasi dan pengabdian dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang diemban oleh IPDN sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang berbasis keilmuan dan praktek pemerintahan.

Setelah menggelar kegiatan, para dosen IPDN ini menyempatkan waktu melihat langsung kebun percontohan “Sahabat Petani” milik Demianus Tarra, direktur eksekutif Mamasa Community Development Foundation (MDCF) di Desa Mellangkena Padang, Sespa, Mamasa.

Ketua Tim, James Robert Pualillin yang merupakan pemateri tentang Pemberdayaan Bumdes, menyampaikan apresiasinya atas semangat pengelola kebun percontohan “Sahabat Petani”, Demianus Tarra dalam membangun desanya.

“Saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa akan semangat dari Pak Demianus Tarra’, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh beliau tapi dengan modal semangat yang membara untuk memanfaatkan pengetahuan, keterampilan serta pengalamannya dapat merubah lahan tidur menjadi lahan produktif. Dari pertemuan yang sangat singkat dengan beliau, saya benar sangat hormat dengan segala upaya beliau untuk menularkan virus bertani, bagaimana beliau berjuang mencari dukungan modal dan lain-lain tanpa mendapat dukungan riil dari para pemangku kebijakan. Sayang kalau orang muda seperti beliau, kita abaikan untuk berjuang sendiri. Sudah waktunya ada sentuhan-sentuhan kecil kebijakan dari para pemangku-pemangku kebijakan yang ada di Mamasa.” tulis James.

<https://mamasenews.com/dosen-ipdn-apresiasi-semangat-pengelola-kebun-percontohan-sahabat-petani/>

Mengelolah Objek Wisata Buntu Liarra' Tidak Harus Menunggu Pemda

September 25, 2017 mediarestorasi 0 Komentar featured



MAMASA, mediarestorasi.com – Objek wisata Negeri diatas awan Buntu Liarra' Kabupaten Mamasa akhir-akhir ini sernaki ramai dikunjungi oleh warga, baik dari Mamasa sendiri maupun dari luar Mamasa.

Tidak sedikit pengunjung yang menyorot pengelolaan objek wisata ini, pasalnya tempat ini merupakan salah satu objek wisata di Mamasa yang baru diketahui setelah menjadi viral di berbagai media beberapa waktu lalu sehingga belum ada upaya baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa untuk mengelolah dengan baik objek wisata menarik ini.

Seperti diungkapkan salah satu pengujung, Abraham dilokasi wisata mengungkapkan, Buntu Liarra' adalah salah satu objek wisata yang menarik di Mamasa, sehingga sangat penting diperhatikan pengelolaannya oleh Pemda untuk menarik para wisatawan agar mau berkunjung.

“mulai dari infrastruktur jalan, sampai ketersediaan sarana prasarana di puncak khususnya tempat sampah dan wc. Kata Abraham.

Hal tersebut juga tidak luput dari perhatian seorang akademisi dari IPDN James Robert Pualillin yang juga adalah putera Mamasa. Dalam kunjungannya ke Mamasa baru-baru ini, James yang ditemui sejumlah awak media mengungkapkan bahwa Objek wisata Buntu Liarra' bisa jadi objek wisata primadona di Kabupaten Mamasa sehingga iapun sependapat jika tempat itu bisa dikelola oleh pemerintah, untuk kesejahteraan Masyarakatnya.

Namun menurut James, tidak mesti menunggu Pemerintah Daerah untuk terlibat langsung, jika hal itu belum bisa dilakukan oleh Pemda apalagi adanya kesibukan dalam menghadapi pesta Demokrasi di Mamasa saat ini, tetapi Pemerintah Desa harus bisa berinisiatif untuk mengelolah objek wisata ini, yaitu dengan membuat regulasi berupa Peraturan Desa untuk menjadi acuan dalam melakukan pengelolaan objek ini.

Sehingga dengan demikian lanjut James, selain akan menambah PAD Desa, juga masyarakat di Desa Itu dengan sendirinya bisa berusaha mencari penghasilan untuk kesejahteraan mereka.

“saya kira ini hal yang tidak perlu dibuat rumit, karena kalau harus menunggu pemda turun tangan. Proses di pemerintah kan masih panjang untuk penganggarannya, baru mau diajukan ke DPR, baru dibahas baru dikerjakan jika di acc di Dewan, lalu sampai kapan kita akan menunggu. sementara ini lagi viral dan ramai dikunjungi. Oleh sebab itu Pemerintah Desa harus berinisiatif, yang penting harus jelas regulasinya dan Masyarakat bisa diberdayakan. Ungkap James

Terkait mekanisme pengelolaannya James berpendapat bisa saja diserahkan ke BUMDesa untuk dikelola, namun itu kembali pada Desa yang bersangkutan bagaimana yang mudah untuk dilakukan. Dan yang paling penting diperhatikan adalah keamanan. Baik keamanan para pengunjung maupun keamanan warga setempat.

Soal tapal batas jika hal itu menjadi suatu persoalan, bagi James hal tersebut tidak penting untuk diperdebatkan tapi cukup dengan kerja sama yang baik antar kedua Desa untuk bersama-sama mengelola dan memelihara tempat ini.

“saya pikir jika hal ini yang akan menjadi permasalahan, marilah kita kita kembali ke falsafah kita orang mamasa “mesa kada dipotuo pantan kada dipomte, sitayuk sipakasalle sirande maya-maya, ole lakso ole dio mai, karena kita semua adalah orang Mamasa yang perlu diberdayakan. Tutup James. (anis)

<http://www.mediaestorasi.com/daerah/sulawesi/james-mengelola-objek-wisata-buntu-liarra-tidak-harus-menunggu-pemda/>

Akademisi : Objek Wisata Buntu Liarra, Lebih Baik Di Kelola BUMDES

Oktober 3, 2017



MAMASA, MdB—Buntu Liarra (Bukit Liarra) yang terletak di Desa Talimbung, Kecamatan Tanduk Kalua' Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat saat ini menjadi objek wisata primadona bagi wisatawan pencinta wisata alam, lantaran di tempat ini pengunjung bisa menyaksikan hamparan awan yang indah yang pemandangannya disebut lebih indah dari Lolai

Objek yang terpantau pertama kali diunggah ke media sosial oleh akun facebook Yoel Olhen Ajah pada tanggal 17 Juni 2015 dengan foto seorang pemuda bertuliskan "Menuju Puncak Buntu Liarra" dan diulang diunggah pada tanggal 26 Juni 2015 dengan foto tiga remaja dengan tulisan "3 Tuyul Penjaga Lautas Es", seharusnya dikelola secara profesional sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Akademisi IPDN James Robert Pualillin, membeti perhatian terhadap boomingnya objek wisata ini, menurutnya fenomena ini harus menjadi momentum bagi pemerintah setempat terutama bagi dua Desa setempat yang menjadi pintu masuk objek wisata Buntu Liarra untuk bentuk Bumdes bersama pengelolaannya “Segera buat Perdes pengelolaan objek tersebut supaya ada payung hukum. Setelah Perdesnya sudah ada, berikan ke Bumdes untuk mengelolanya”terang James kepada media di Mamasa beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, peluang usaha pengelolaan objek ini sangat terbuka, seperti redistribusi tiket, persewaan tenda, payung, pengisian power HP, toilet, warung, jasa angkut dan serta usaha mikro lainnya dan bahkan restoran sangatlah prospek, namun demikian kata James, semua itu bisa dilakukan setelah ada aturannya berupa Perdes, dan pengelolaannya harus lewat BUMDES.

Pengelolaan oleh Bumdes menurutnya paling tepat karena sangat relevan dengan upaya pemerintahan Jokowi mendorong lahirnya Badan Usaha Milik Desa. “Sangat tepat kalau dikelola Bumdes, karena sejalan dengan program Jokowi yang mendorong munculnya Badan Usaha yang di desa, “tambahnya. (L30)

<https://mamasenews.com/akademisi-objek-wisata-buntu-liarra-lebih-baik-di-kelola-bumdes/>

POLITIK BALIHO SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK PRAGMATIS

Oktober 14, 2017 mediarestorasi 0 Komentar featured

Oleh : James Robert Pualillin



Asisten Direktur Program Profesi Kepamongprajaan
IPDN dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (PP-MIPI)

Akhir-akhir ini, menjelang Pilkada serentak tahun 2018 hampir di semua daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut, termasuk Kabupaten Mamasa diramaikan dengan semaraknya baliho (spanduk) politik dari para calon (kandidat), yang “memproklamkan” dirinya untuk ikut sebagai peserta pilkada tersebut. Ironisnya keindahan kota jadi “terusik” dengan kehadiran baliho (spanduk) dengan berbagai ukuran dan bentuk, mulai dari sudut-sudut jalan di kampung-kampung, sampai di ruas-ruas jalan protokol kabupaten/kota, yang terkesan semrawut dan jorok.

Maraknya baliho (spanduk) politik tersebut, menunjukkan kegagalan dari para calon (kandidat) dalam membangun komunikasi politik yang cerdas kepada konstituen di daerah tersebut. Sehingga para calon (kandidat) tersebut terjebak pada “komunikasi politik pragmatis”. Komunikasi politik via baliho (spanduk), secara pragmatis, tidak mampu mendorong “pendidikan politik yang cerdas bagi masyarakat”, karena :

Pertama : Politik baliho (spanduk), “tidak mampu” mengkomunikasikan sesuatu (hal-hal) yang merupakan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat ke depan. Tapi hanya sekedar “pengenalan secara instan” figur-figur dari para calon (kandidat), dengan tidak menyentuh substansi persoalan yang terjadi dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara riil (nyata).

Kedua : Kepedulian bersifat terbatas, karena hanya terjebak dengan memanfaatkan moment-moment keagamaan atau hari-hari besar tertentu saja, dan menjadi “menu favorit” dari politik baliho/spanduk. Pesannya hanya sekedar ingin menunjukkan “kepedulian” dan “keberpihakan” seorang calon pada komunitas tertentu.

Ketiga : Penyampaian program mengambang, cenderung tidak jelas hanya sekedar slogan (motto) semata-mata. Ironisnya ada juga yang tidak menyampaikan pesan program apa-apa, selain memamerkan wajahnya dengan berbagai kostum (pakaian). Kalaupun ada, hanya sekedar ucapan mohon doa restu dan janji ala kadarnya yang bersifat mengambang serta belum mampu menjawab kebutuhan riil yang diinginkan oleh masyarakat luas.

Keempat : Mengandalkan simbol dan figuritas sosok tertentu. Kita sering menjumpai politik baliho yang marak terpampang di setiap sudut jalan, dengan mengaitkan keberadaan tokoh nasional tertentu, seolah-olah calon (kandidat) tersebut menjadi representasi dari tokoh tersebut. Padahal kalau mau jujur dan secara nyata, para tokoh tersebut mungkin tidak memahami persoalan yang ada di daerah tersebut, atau juga sosok nasional tersebut tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan yang riil dari masyarakat di daerah tersebut.

Kelima : Karena politik baliho, dianggap sebagai “cara instan” mengenalkan figur dari para calon (kandidat) tersebut, akhirnya memaksa para calon tersebut memajang wajah mereka demikian besar atau demikian banyaknya, seolah yakin semakin besar wajah mereka terpasang dan seringnya wajah mereka dilihat oleh rakyat di setiap persimpangan jalan, maka akan semakin besar pilihan rakyat jatuh ke mereka yang memasang wajah besar-besar di pinggir jalan protokol dan jalan kampung.

Sudah waktunya, kita memberi kesadaran pada publik (masyarakat), melalui pendidikan politik pencerahan, dengan media komunikasi politik yang cerdas, bukan melalui media komunikasi politik yang pragmatis. Membangun komunikasi politik yang cerdas, selain mendorong pendidikan politik masyarakat (konstituen) agar lebih cerdas, juga menumbuhkembangkan kesadaran dan keyakinan secara kolektif (publik), bahwa proses demokrasi yang sedang berlangsung (pilkada serentak 2018) adalah sebuah proses yang bermanfaat bagi publik, karena publik yakin akan jawaban-jawaban atas berbagai

pertanyaan dari persoalan yang sedang di hadapi dan bagaimana solusinya ke depan.

Sehingga dalam komunikasi politik yang cerdas, maka setiap calon (kandidat), harus mampu membangun komunikasi timbal balik dengan publik, tentang :

Pertama : Mereka (para calon/kandidat), harus mampu untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pokok yang sedang dihadapi masyarakat tersebut.

Kedua : Mereka (para calon/kandidat), harus mampu mengkomunikasikan kepada publik, tentang solusi apa yang ditawarkan (menjadi program mereka kalau publik memberi amanah kepadanya). Setidak-tidaknya secara konseptual program-programnya harus jelas, terarah, terukur, realistis, dan tahapan pencapaiannya baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang terukur serta dapat di informasikan secara terbuka kepada publik.

Ketiga : Yang terpenting adalah bagaimana para calon tadi mampu mengkomunikasikan kepada publik secara terbuka akan komitmennya, konsistensinya dalam menjalankan program-program yang sudah menjadi komitmen para calon.

Dalam politik baliho (spanduk), tentu saja tidak perlu semua persoalan disampaikan di dalamnya, namun setidaknya publik diinformasikan tentang apa yang menjadi prioritas program dari para calon, dan mampu memberi gambaran kepada rakyat hal-hal apa yang akan dilakukan untuk mencapai program prioritas tersebut. Ini bisa di lakukan oleh para pengikut, simpatisan dari para calon

tersebut, baik dilakukan di warung-warung kopi, di media sosial atau juga bisa melalui forum-forum resmi (seperti talk show dari para calon).

Ketidakmampuan menghadirkan komunikasi politik yang cerdas kepada masyarakat luas (publik), dan justru terjebak dengan komunikasi politik pragmatis melalui media politik baliho (spanduk), di sebabkan, karena :

Pertama : Para calon (kandidat), memang tidak mengetahui sama sekali persoalan apa yang di hadapi oleh masyarakat di daerah tersebut, sehingga tidak mampu merumuskan program-program yang tepat sasaran dan berdampak "*multiplier effect*" untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara luas. Sehingga mereka "tidak pede (tidak percaya diri) dan tidak berani" untuk terjebak masuk dalam komunikasi politik yang cerdas, dan pilihannya hanya melalui media komunikasi politik pragmatis tadi (politik baliho).

Kedua : Keterbatasan kapabilitas dan kompetensi dari para calon (kandidat), sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan *comprehensive* untuk menjawab persoalan-persoalan di masyarakat dengan program-program yang jelas, realistis, terukur, terarah serta limit waktu pencapaiannya. Analoginya, ibarat seorang pendaki gunung, maka pendaki tersebut harus memiliki kecakapan, kompetensi seperti kemampuan membaca peta, kemampuan membaca mata angin, memiliki pengetahuan *survival* dan membangun bivak bahkan keterampilan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Ketiga : Bisa jadi, karena para calon (kandidat) tadi sengaja membuat kabur program-program mereka, karena mereka tidak ingin ditagih oleh masyarakat (sebagai janji politik). Sehingga amannya, maka mereka lebih suka terjebak pada komunikasi politik pragmatis dengan slogan-slogan yang mengambang, tidak jelas dan sekedar basa-basi politik.

Celakanya, justru banyak di beberapa daerah politik baliho (komunikasi politik pragmatis), dijadikan ukuran dan indikator dari hasil survey, dan mengabaikan metodologi-metodologi ilmiah dalam tahapan survey. Ironinya lagi, ketika publik (masyarakat), “dipaksa” untuk percaya dengan hasil survey yang hanya berdasarkan hasil politik baliho (komunikasi politik pragmatis).

Media Oktober, 2017

<http://www.mediarestorasi.com/daerah/politik-baliho-sebagai-komunikasi-politik-pragmatis-oleh-james-robert-pualilin/>